

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Sistem pembayaran, yang merupakan suatu sistem dari rangkaian panjang pengeluaran negara, adalah sistem yang dimiliki Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengeluarkan uang dari rekening pengeluaran untuk keperluan pembayaran kepada yang berhak. Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan metode tunggal yakni melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Dari rangkaian berbagai aktivitas pada sistem pembayaran, settlement SP2D merupakan akhir dari seluruh rangkaian pada sistem pembayaran. Tepat jumlah, tepat orang dan tepat waktu merupakan tiga elemen dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pembayaran. Proses penerbitan dan settlement SP2D sendiri telah mengalami banyak penyempurnaan, seperti percepatan penerbitan SP2D dan penyampaian soft copy SP2D kepada Bank Operasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi kelemahan yang perlu dicari solusinya. Dua kelemahan yang paling dirasakan adalah tidak dapat dipastikannya kapan aliran dana pencairan SP2D dapat diterima yang berhak serta kemungkinan terjadinya retur transaksi SP2D. Meski penyebab retur telah

dapat diidentifikasi, namun sejauh ini belum terdapat upaya yang komprehensif dan tuntas untuk pencegahannya. Selain dua kelemahan tersebut, aktivitas settlement SP2D saat ini masih didominasi dengan proses manual dan terlalu banyak membutuhkan intervensi manusia. Penulisan buku ini ditujukan untuk menghasilkan solusi yang sistematis dan upaya pencegahan atas berbagai permasalahan yang timbul. Penyempurnaan settlement SP2D didasarkan atas penyempurnaan proses bisnis seluruh aktivitas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berlaku umum di dunia perbankan. Untuk mencegah terjadinya retur – sebuah proses yang sangat memakan waktu dan biaya – diusulkan untuk menerapkan metode validasi atas data dan status rekening tujuan pembayaran dengan menggunakan koneksitas dengan penyedia jaringan data perbankan. Untuk tujuan yang sama, perlu dilakukan penyempurnaan atas aplikasi satker berupa database rekening yang menyimpan data rekening pihak ketiga sehingga mengurangi aktivitas entry dan re-entry nomor rekening pada aplikasi satker termasuk pembangunan model aliran dan keamanan informasi data rekening dari satker kepada KPPN hingga diteruskan kepada pihak perbankan. Sejalan dengan penyempurnaan proses bisnis di atas, turut diusulkan untuk membangun relasi langsung antara rekening pengeluaran yang didebit dengan rekening penerima dana, dengan cara

membebaskan Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat pada bank yang sama dengan bank pada rekening tujuan. Selain untuk mengurangi jumlah jaringan perbankan yang terlibat, juga untuk penyederhanaan jumlah rekening yang dikelola BUN dan sebagai sentralisasi settlement kas melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Implementasi berbagai usulan pada buku ini dibagi ke dalam dua periode, yakni sebelum Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan pada saat SPAN dijalankan. Periodisasi implementasi perlu dilakukan karena terdapat dua sistem yang berbeda pada dua kurun waktu yang berbeda pula. Selain untuk mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas baru, periodisasi tersebut juga untuk memberikan jaminan bahwa seluruh usulan penyempurnaan dapat diimplementasikan dengan baik.

Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun chief operating officer (COO) sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementerian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada: fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal. Regulation of the Indonesian Minister of Finance on guidelines for formulation and review of work plans and budgets of state ministries/agencies and ratification of list of budget implementation.

Postur APBN Indonesia

STAN adalah kampus yang akan menghasilkan pegawai-pegawai yang akan ditempatkan di Instansi-instansi krusial. Untuk menghasilkan pegawai yang

berintegritas, STAN selalu menerapkan disiplin yang tinggi, terutama kejujuran. Agar anda mampu bersaing dan lulus Ujian Saringan Masuk STAN, anda harus terbiasa menyelesaikan soal-soal yang akan diujikan di dalam USM STAN. Buku yang diterbitkan oleh penerbit LEMBAR PUSTAKA INDONESIA ini berisi jenis-jenis soal yang biasanya diujikan dalam USM STAN. Seperti Tes Kemampuan Umum, Tes Bahasa Indonesia - Inggris, Tes Potensi Akademik . Jika anda mampu menyelesaikan soal-soal yang ada di dalam buku ini, maka kemungkinan besar anda bisa lulus dalam Ujian Saringan Masuk STAN. -Lembar Langit Indonesia Group-

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan dan mengelola suatu negara. Walaupun ada berbagai faktor baik itu faktor dalam negeri maupun faktor global yang dapat menjadi faktor penentu. Buku ini terdiri dari 10 (sepuluh) BAB dengan masing-masing bahasan yang berbeda antara lain: Sejarah Perekonomian Indonesia Sistem Ekonomi Indonesia Pelaku Dan Peran Perekonomian Indonesia Transformasi Struktural Perekonomian Indonesia Anggaran Dan Pendapatan Belanja Negara Neraca Pembayaran Luar Negeri Indonesia Sektor Pendanaan Dan Perbankan, Pendanaan, Pembiayaan. Pengentasan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Perekonomian Indonesia Dalam Era Globalisasi Krisis Ekonomi Di

Indonesia

Pernahkah Anda berpikir, mengapa tidak sedikit proyek yang sudah berjalan namun mengalami hambatan atau bahkan tidak sampai diselesaikan alias mangkrak? Mengapa ada program yang tak kunjung menghadirkan manfaat? Lalu bagaimana menjawab semua persoalan tersebut? Buku ini menawarkan konsep Pendekatan Program Berbasis Spasial (PPBSp) sebagai dasar filosofis dan metode analisis dalam menyelenggarakan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan manfaat program, dengan mengedepankan integrasi spasial. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah guna mewujudkan sinergi pembangunan melalui pengelolaan pekerjaan secara efisien dan efektif. Muatan dalam buku ini telah banyak didiskusikan bersama para akademisi internasional dan dalam negeri, serta para kolega birokrat di berbagai instansi pemerintah, sebagai bagian dari riset penulis saat mengambil program doctoral di School of Architecture, Planning, and Landscape, Newcastle University di Inggris. Buku ini tidak hanya ditujukan bagi aparatur pemerintah, juga dapat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, konsultan dan pemerhati pembangunan nasional dan daerah, dan juga masyarakat luas. Tujuannya tak lain agar kita dapat memahami proses pembangunan dan mampu menganalisis bagaimana semestinya pembangunan tersebut diselenggarakan.

Buku ini merupakan profil implementasi PUG pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Materi Hukum Keuangan Negara merupakan salah satu materi yang cukup dinamis. Perkembangan tiap tahunnya bergantung pada situasi berjalannya negara, khususnya berjalannya pemerintahan. Materi ini akan berpaku pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU a quo berperan sebagai payung hukum berkaitan dengan administrasi keuangan di Indonesia. Oleh karenanya perkembangannya, diperlukan suatu pedoman yang dapat memberikan arah dalam perkuliahan Hukum Keuangan Negara melalui buku ajar. Buku ajar merupakan salah satu media yang dapat membantu terciptanya prose belajar mengajar yang lebih efektif. Melalui buku ajar ini, diharapkan perkuliahan Hukum Keuangan Negara dapat terlaksana secara terencana dan terarah, serta dapat memberikan referensi tambahan bagi mahasiswa dalam belajar mata kuliah ini.

In this holistic study of the integration of faith and learning, Dr. Sarinah Lo challenges the Western tendency to privilege knowing over being and doing. In the context of Indonesian higher education, Dr. Lo addresses the cognitive, affective, spiritual, relational, and vocational aspects of human nature. She demonstrates that effective integration of faith and learning must reach beyond the academic disciplines to address the formation of a Christian perspective in all areas of life, thought, and practice. Utilizing in-depth interviews and qualitative analysis, Dr. Lo's field research explores the specific challenges facing Christian faculty in Indonesia, where the rise of radical Islam and the pressure to conform to state ideology raise unique questions about the nature of faith-learning integration. The first study of its kind, this is an excellent resource for educators wanting to think more broadly about what it means to follow Christ in the classroom, pushing beyond Western models of integration to

embrace the more holistic approach of faith-integrated being, knowing, and doing.

Update Soal & Strategi Lolos SPMB PKN STAN 2020 STRATEGI LOLOS Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN) adalah Perguruan Tinggi Vokasi di bawah naungan Kementerian Keuangan RI yang menyelenggarakan Program Studi Diploma di Bidang Keuangan Negara. PKN STAN diresmikan pada tanggal 15 Juli 2015 merupakan transformasi dari sekolah kedinasan yang cukup dikenal yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Apakah lulusan PKN STAN saat ini sudah tidak diangkat lagi menjadi PNS? Pendidikan PKN STAN memakai sistem ikatan dinas. Lulusannya wajib kerja selama tiga kali masa pendidikan ditambah satu tahun. Lulusan PKN STAN akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ditempatkan di instansi-instansi dalam lingkungan Kementerian Keuangan dan instansi-instansi pemerintah lainnya, baik di pusat maupun di daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa itu SPMB PKN STAN? Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN (SPMB PKN STAN) adalah satu-satunya jalur penerimaan mahasiswa baru PKN STAN. SPMB PKN STAN merupakan salah satu ujian penerimaan mahasiswa baru yang paling bersih di Indonesia. Pelaksanaan SPMB PKN STAN sepenuhnya bergantung pada hasil tes pesertanya. Apa saja tahapan ujian PKN STAN? 1. Tes Tertulis berbasis sistem CAT, terdiri dari: a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) b. Tes Potensi Akademik (TPA) c. Tes Bahasa Inggris (TBI) 2. Tes Kesehatan dan Kebugaran Apa itu CAT (Computer Assisted Test)? CAT adalah metode seleksi menggunakan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi CPNS. Dengan metode CAT proses pemeriksaan dan pelaporan hasil ujian menjadi lebih cepat. Selain itu, sistem CAT menciptakan standarisasi hasil ujian secara

nasional dan mewujudkan transparansi, obyektifitas, serta akuntabel. kesulitan apa yang dihadapi dalam ujian spmb pkn stan? 1. Persiapan kurang, 2. Tidak terbiasa menghadapi ujian tpa, 3. Kurangnya informasi mengenai materi yang diujikan, dan 4. Faktor psikologis karena banyaknya jumlah peserta SPMB PKN STAN.

Buku Esai Keuangan Negara: Pemikiran Multi Perspektif merupakan kelanjutan dari seri sebelumnya, yaitu Esai Keuangan Negara: Pemikiran Multi Perspektif. Buku ini dikupas dalam tiga tema besar pengelolaan keuangan negara, yaitu dari sisi perpajakan, keuangan publik, serta akuntansi pemerintah. Serupa dengan edisi sebelumnya, buku ini merupakan hasil pemikiran dan sumbang saran para dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya pada posisi struktural di berbagai bidang pekerjaan di Kementerian Keuangan. Dinamika perekonomian baik di tingkat global maupun domestik memengaruhi keuangan negara. Tantangan perekonomian yang terus dihadapi mendorong Pemerintah untuk terus menyesuaikan serangkaian kebijakan fiskal baik melalui instrumen kebijakan pendapatan negara, belanja negara, ataupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara, khususnya perpajakan, Pemerintah menghadapi tantangan belum optimalnya pendapatan negara untuk menutup kebutuhan belanja negara. Dari sisi belanja negara, Pemerintah menghadapi tantangan terutama mandatory spending yang signifikan, kualitas dan efisiensi belanja negara, serta penyerapan anggaran di akhir tahun. Dari sisi pembiayaan anggaran, Pemerintah menghadapi tantangan dalam upaya efisiensi atas kombinasi sumber-sumber pendanaan pembiayaan anggaran, yang harus tetap mengacu kepada prinsip prudent dan sesuai dengan kaidah fiskal dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, namun tata kelola keuangan negara

semakin menunjukkan perbaikan. Pada 2016, untuk pertama kalinya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan BUN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Buku ini ditutup dengan artikel-artikel tentang tinjauan atas praktik akuntansi Pemerintah. Kajian terhadap kondisi yang nyata terjadi di lapangan diharapkan dapat menjadi referensi untuk perbaikan secara terus-menerus yang perlu dilakukan. Buku ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi bagi berbagai kalangan. Melalui buku ini, diharapkan bagi para pendidik, mahasiswa, maupun masyarakat umum semakin memahami dinamika dan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara serta alternatif penanganannya.

Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan penyempurnaannya,

ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian. On budget allocation in the state budget of Indonesia.

Momentum reformasi keuangan negara ditandai dengan lahirnya paket Undang-undang Keuangan Negara. Salah satu yang diatur dalam paket undang-undang ini adalah mengenai pembagian peran yang jelas antara Kementerian/Lembaga sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Satker disebut sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang teknis tertentu pemerintahan, sementara Menteri Keuangan disebut sebagai Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI. Sebagai COO, Satker diberikan kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan dengan sebelumnya, khususnya dalam hal kewenangan administratif. Kewenangan administratif tersebut meliputi kegiatan pembuatan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, kegiatan pengujian dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada Satker sehubungan dengan realisasi perikatan tersebut, serta pemberian perintah pembayaran atau penagihan penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Di lain pihak, Menteri Keuangan sebagai CFO berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas dan

regulator pengelolaan keuangan negara, serta sebagai fund manager pemerintah. Sejalan dengan pembagian tugas antara CFO dan COO, maka konsep “let the manager manage” diselenggarakan, dimana konsep ini memberikan keleluasaan dalam batas-batas peraturan perundangan kepada Satker dalam pengelolaannya. Satker dalam pengelolaan keuangannya mempunyai kedudukan yang unik dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pengelolaan perbendaharaan negara di Departemen Keuangan (Ditjen Perbendaharaan). Satker dapat dilihat sekaligus sebagai stakeholder, customer, client, user, owner dan/atau counterpart dari Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara di Satker harus berjalan seiring dengan pengelolaan keuangan negara di Ditjen Perbendaharaan. Pengelolaan keuangan negara di Satker merupakan salah satu input bagi Ditjen Perbendaharaan dalam fungsinya sebagai Kuasa BUN baik itu dalam hal akuntabilitas maupun dalam hal fund management. Implikasinya, kemampuan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan Satker sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan fungsi treasury di Ditjen Perbendaharaan.

Reformasi di bidang keuangan Negara, yang antara lain diwujudkan dalam bentuk reformasi penganggaran dan perbendaharaan, mengagendakan sejumlah

penyempurnaan terutama di bidang proses bisnis, teknologi informasi dan manajemen perubahan. Dalam penyempurnaan ini, pengintegrasian fungsi-fungsi sistem penganggaran dan perbendaharaan menjadi dasar bagi upaya pencapaian akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang dapat diandalkan. Sistem pengelolaan keuangan negara yang modern, transparan dan akuntabel menjadi tujuan yang akan dicapai dalam reformasi penganggaran dan perbendaharaan, yang diwujudkan dalam bentuk sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN). Sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan reformasi, maka penyempurnaan proses bisnis adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu langkah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara tersebut adalah dengan pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan pemerintah dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah. Selain penyempurnaan proses bisnis, untuk mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara yang diwujudkan dalam bentuk penyampaian laporan keuangan yang

andal dan tepat waktu, penerapan teknologi informasi akan sangat diperlukan. Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran, dan manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan negara melalui SPAN ini, diharapkan SPAN dapat menghasilkan suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang andal demi terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penyempurnaan proses bisnis akuntansi dilatarbelakangi oleh amanat UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara, maka SPAN akan memfasilitasi proses bisnis akuntansi yang menggunakan basis akrual sebagai dasar pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Basis akrual ini akan dipergunakan untuk pelaporan keuangan, namun penyusunan anggaran tetap menggunakan basis kas. Perubahan basis akuntansi dari semula cash towards accrual (kas menuju akrual) menjadi basis akrual membawa dampak terhadap perubahan jenis laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan basis kas untuk penganggaran dan basis akrual untuk akuntansi dan pelaporan, maka akan dihasilkan laporan keuangan pemerintah berbasis kas dan berbasis akrual. Laporan berbasis kas berupa laporan realisasi anggaran dan laporan

perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan laporan keuangan yang berbasis akrual akan meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul General Ledger dan Chart of Accounts atau yang disebut juga modul akuntansi dalam SPAN, disusun dengan mengacu pada RPP Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan fitur-fitur General Ledger pada Oracle, karena belum adanya kebijakan akuntansi akrual hingga saat ini. Penyempurnaan proses bisnis akuntansi dalam modul ini diiringi dengan penyusunan sistem akuntansi, framework Bagan Akun Standar dan framework akuntansi akrual. Perubahan yang difasilitasi oleh modul ini antara lain perubahan sistem akuntansi di KPPN, berupa penyatuan sistem akuntansi umum (SAU) dan sistem akuntansi kas umum negara (SAKUN) menjadi satu sistem akuntansi yang terintegrasi. Dengan sistem yang terintegrasi ini, akan diakomodir pencatatan secara basis kas dan akrual sehingga dapat dihasilkan laporan berbasis kas berupa laporan realisasi anggaran dan laporan berbasis akrual seperti neraca dan laporan operasional. Sejalan dengan perubahan basis akuntansi dari kas menuju akrual menjadi akrual, maka selain sistem akuntansi, perubahan Bagan Akun Standar menjadi agenda penting dalam penyempurnaan sistem akuntansi pemerintah. Perubahan Bagan Akun Standar terutama pada struktur dan akun-akunnya ini dikarenakan adanya penerapan basis akrual,

manajemen komitmen, dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga terdapat penambahan akun-akun akrual seperti beban persediaan, akun komitmen, dan informasi mengenai output. Selain perubahan sistem akuntansi dan bagan akun standar, perubahan juga terjadi pada modul akuntansi yang ada pada proses bisnis di modul GL. Proses bisnis akuntansi yang ada pada modul General Ledger, dimulai dari proses bisnis yang ada pada modul lain, yang disebut juga subledger. Subledger tersebut terdiri dari Budget Preparation (BP), Management of Spending Authority (SA), Commitment Management (BC), Payment Management (PM), Government Receipt (GR), dan Cash Management (CM). Transaksi-transaksi yang dicatat pada masing-masing subledger tersebut akan dikirim ke GL sehingga jurnal entries akan terposting di GL. Proses bisnis tersebut terdiri dari proses pemutakhiran BAS, penyiapan opening balance, proses penyiapan kurs atas transaksi berbasis valas, koreksi, rekonsiliasi internal, dan konsolidasi. Dengan penyempurnaan proses bisnis akuntansi, diharapkan SPAN dapat memfasilitasi perubahan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan sehingga dapat mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang andal.

Tulisan ini menyajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi prinsip-prinsip tata kelola penggalan pendapatan universitas yang baik, implementasi prinsip-prinsip

tata kelola penggalan pendapatan universitas yang baik dan permasalahan serta kendala dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip tata kelola penggalan pendapatan universitas yang baik tersebut kemudian dianalisis dan dibahas dengan menggunakan perspektif teori agensi. Buku ini merupakan pengembangan dari disertasi yang telah penulis selesaikan pada awal tahun 2013 sehingga nuansa hasil sebuah penelitian sangat kental terasa dalam isi buku ini.

Peluang dan Lulus Ujian Saringan Masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2015 memang berat, hal tersebut terbukti dari jumlah peserta yang mendaftar tahun 2014 mencapai 102 ribu orang. Selain itu, perbandingan antara jumlah peserta yang mengikuti verifikasi berkas dan yang dinyatakan lulus tes tahap pertama sebesar 6,42% yang artinya setiap orang mengalahkan sekitar 15 peserta yang lain. Untuk kalian yang dinyatakan lulus pada tahap pertama, patutlah berbangga karena kalian adalah orang-orang terpilih. Namun, kalian jangan terlalu tinggi hati karena tahap seleksi masih panjang. Masih ada tes kesehatan, kebugaran, dan tes wawancara. Ketiga tes tersebut juga sangat menentukan kelulusan kalian. Tidak sedikit yang gagal pada ketiga tes tersebut. Buku *Siap Menghadapi USM STAN 2015* merupakan buku terlangkap dan wajib kamu miliki agar bisa diterima di STAN. Apa saja sih keunggulan buku ini? •

Buku ini disusun oleh Tim Bimbel Enormous yang telah meluluskan 102 siswa pada USM STAN 2014 (Terbesar meluluskan siswa ke STAN Jakarta). • Disusun oleh Alumni STAN yang telah berpengalaman selama 7 tahun dalam meluluskan siswa ke STAN. • Berisi soal, jawaban, bahasan soal USM STAN tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, dan 2014. • Empat paket soal dan pembahasan prediksi USM STAN 2015. • Informasi lengkap tata cara pendaftaran USM STAN. • Tip dan trik tes kesehatan, kebugaran, dan wawancara. Tunggu apalagi segera miliki buku ini, belajar dari sekarang, dan semoga lolos USM STAN!!!

Asia and the Pacific have become the growth engine of the world economy with the contribution of two-third of the global growth. The book discusses current issues in economics, business, and accounting in which economic agents, as individuals, entrepreneurs and professionals, as well as countries in the Asia and Pacific regions compete and collaborate with each other and with the rest of the globe. Areas covered in the book include economic development and sustainability, labor market competition, Islamic economic and business, marketing, finance, accounting standard compliances, and taxation. It will help shed light on what business and economic scholars in regions have done in terms of research and knowledge development, as well as the new frontiers of research that have been explored and opening up. This is an Open Access

ebook, and can be found on www.taylorfrancis.com.

Buku monograf ini berisi penelitian tentang Peran Profesionalitas dan Kepercayaan Antar Pegawai dalam Memediasi Pengaruh Antara Gaya Kepemimpinan Transglobal dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai yang merupakan Studi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Buku ini disusun dalam 5 bab, yang dimulai dengan memaparkan permasalahan organisasi di PPATK, teori tentang Kepemimpinan Transglobal, Kajian hasil penelitian terdahulu tentang hubungan antara Kepemimpinan transglobal, budaya organisasi, profesionalitas, dan kepercayaan antar pegawai, dengan kinerja, serta paparan hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transglobal dan budaya organisasi terhadap profesionalitas, kepercayaan antar pegawai, dan kinerja pegawai. Juga terdapat pengaruh profesionalitas dan kepercayaan antar pegawai terhadap kinerja pegawai.

Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri. Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah

dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan memperkuat fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.

Buku ini menyediakan berbagai macam soal yang dapat dikerjakan pembaca sebagai sarana latihan sebelum menempuh tes yang sesungguhnya. Dengan mengerjakan soal-soal yang telah tersedia maka pembaca diharapkan dapat lebih memahami bahwa tes yang disajikan dalam tes seleksi UJIAN MASUK SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA selalu terbagi dalam beberapa tahapan yaitu tes tertulis, psikotes, tes kesehatan hingga pada tahapan akhir yaitu wawancara.

This Manual deals with concepts, definitions, and procedures for the compilation of statistics on government finance. It is intended as a reference tool for those

who are called upon to prepare or evaluate such statistics. Focusing on financial transactions such as taxing, borrowing, spending, and lending, the Manual emphasizes the summarization and organization of statistics appropriate for analysis, planning, and policy determination.

Seiring dengan kemajuan era globalisasi, seluruh kegiatan bisnis harus unggul secara kompetitif, yaitu bersaing untuk memberikan nilai yang berkualitas dengan biaya yang efisien. Industri televisi telah menjadi bisnis yang sangat penting dan sorotan berbagai pihak. Pada kondisi ini, saya tertarik untuk mendalami lebih detail sebagai organisasi yang dikelola dengan manajemen yang modern. Jika dicermati lebih lanjut, perkembangan industri televisi semakin hari semakin menarik dan bergairah untuk dikaji. Untuk itu saya ingin mencatatnya dalam tulisan ini.

Collection of Indonesian Minister of Finance regulations on preparation of work plan and budget for ministry and government institutes in Indonesia.

Penggunaan transaksi keuangan secara elektronik saat ini tidak hanya banyak dilaksanakan pada sektor swasta, namun juga mulai berkembang pada sektor pemerintahan. Bila mengacu pada APBN 2011 yang sudah di atas Rp.1.000 triliun, maka sejumlah itu pula nominal transaksi keuangan negara yang akan terjadi selama periode satu tahun anggaran. Melihat besarnya nominal transaksi

keuangan negara yang dilaksanakan selama periode tahun anggaran tersebut, aspek keamanan dalam pelaksanaan pencairan dana pemerintah perlu mendapat perhatian yang optimal. Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada segenap jajaran pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penyaluran dana APBN tentang pentingnya peningkatan keamanan dalam transaksi keuangan negara. Dalam rangka menuju penerapan transaksi keuangan negara secara elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik sangat diperlukan untuk meningkatkan authenticity dan security dari dokumen perintah membayar yang diajukan oleh kementerian negara/lembaga/satuan Kerja. Mengingat bahwa implementasi transaksi keuangan negara secara elektronik (termasuk penerapan tanda tangan elektronik) ini merupakan suatu proses bisnis baru di lingkungan pemerintahan dan akan mengubah mind set dan kebiasaan para pihak yang terlibat di dalamnya, maka dibutuhkan dukungan secara penuh dari unsur pimpinan, termasuk dari stakeholder terkait.

Pembangunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) – yang akan menjadi sistem manajemen keuangan dalam pengelolaan APBN di tahun 2012 – akan membawa implikasi pada perubahan proses bisnis pengelolaan anggaran. Meski desain utama pembangunan SPAN berada pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perubahan yang diusung akan berpengaruh pada proses bisnis di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah. Hal tersebut adalah suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per provinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan

informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.

DPR 2014-2019 sepanjang tahun pertamanya bekerja menampilkan sejumlah fenomena baru dalam praksis politik demokrasi sepanjang masa reformasi. Ini merupakan DPR yang terbelah dalam dua koalisi politik besar sejak awal pembentukannya karena pengaruh langsung dari kompetisi ketat Pilpres 2014. Untuk pertama kalinya juga, satu Parpol yaitu: Partai Demokrat, menyatakan secara tegas untuk tidak berkubu dalam koalisi politik KIH atau KMP. DPR baru ini juga diawali dengan kecenderungan kuat untuk memaksakan pengkubuan dalam mayoritas-minoritas Koalisi politik untuk membentuk komposisi penguasaan kursi DPR secara permanen untuk menentukan pembuatan keputusan di DPR. Pemenuhan tuntutan (intersepsi) KIH untuk mendapatkan bagian kursi kepemimpinan DPR nampak merupakan cara taktis melepas "boikot politis" KIH dengan tanpa mengurangi sedikitpun penguasaan kursi DPR oleh KMP. Pengkubuan politik dalam KMP dan KIH berlangsung secara relatif stabil

sepanjang satu tahun masa kerja DPR. Buku persembahan penerbit Formappi We are delighted to introduce the 2019 Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences (B-SPACE). The aim of B-SPACE (Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences) is to provide a platform for various stakeholders, varying from professionals, researchers, and academicians from across the world to present their scientific take and research results on social and political matters. The theme of B-SPACE 2019 was “Gender & Digital Society 4.0”. The amount of participants registered on the initial phase was 140. However, BSPACE 2019 cumulatively consisted of 79 scientific papers, presented orally by the respective authors during the two-day-conference. The oral presentation sessions were opened for the public, allowing a productive interaction between the presenters and the audience where knowledge and information were further shared. Aside from the opportunity to present them in front of an audience, the submitted scientific papers are processed to be published in EAI/EUDL proceedings.

Pemanfaatan kartu kredit di lingkungan pemerintahan merupakan sebuah inovasi yang diusung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai upaya untuk memperbanyak payment channel (saluran pembayaran) atas beban APBN, meminimalisir penggunaan uang tunai serta mendukung perencanaan kas yang lebih baik. Berbagai manfaat dari penggunaan kartu kredit yang akan dirasakan langsung oleh berbagai pihak yang terlibat dan pada akhirnya akan membantu menggerakkan perekonomian nasional.

Upaya mitigasi terhadap risiko penggunaan kartu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi fraud baik dengan penyempurnaan proses bisnis, penguatan teknologi informasi dan pembinaan sumber daya manusia yang terlibat. Dasar hukum penggunaan kartu kredit juga perlu disusun untuk memperkuat posisi penggunaan kartu kredit sebagai subsistem pembayaran pemerintah. Untuk mendapatkan pengalaman dan sebagai langkah awal untuk memperluas penggunaan kartu kredit pemerintah maka perlu dilakukan uji coba penggunaannya pada lingkup organisasi dan jenis belanja yang terbatas. Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pertama yang melakukan uji coba penggunaan kartu kredit untuk membiayai perjalanan dinas akan berperan menjadi role model penggunaan kartu kredit di lingkungan pemerintah. Penyempurnaan uji coba tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk perluasan penggunaan kartu kredit pada jenis belanja dan instansi pemerintahan yang lebih luas. Buku ini diberi judul Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum pajak itu merupakan hukum yang bersifat cross border law dan multidisipliner sehingga dalam menjelaskan kedudukan dan memahami maksud dari ketentuan hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan perpajakan harus mengaitkannya dengan bidang hukum lain sebagai satu kesatuan dalam sistem tata hukum nasional dan dengan melalui pendekatan ilmu administrasi dan akuntansi. Keterkaitan ilmu hukum dengan ilmu administrasi perpajakan, ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu

hukum lainnya merupakan keniscayaan, agar dalam penerapannya menjadi sederhana dan efektif. Penerapan ilmu administrasi, akuntansi, dan ilmu keuangan dilakukan untuk melakukan penelitian dan analisa terhadap keberadaan objek pajak berikut potensinya. Sementara, penerapan ilmu hukum umum lainnya, tidak dilakukan secara serta merta ke dalam hukum pajak, melainkan dengan melakukan penyesuaian dan modifikasi dengan berbagai cara seperti dengan memberikan pengertian, batasan, perluasan, dan pengecualian tersendiri terkait dengan subjek, objek, dan akibat hukum pajak yang sekaligus menjadikan hal-hal tersebut sebagai kekhususan yang berlaku dalam ilmu hukum pajak. Kekhususan tersebut bertujuan untuk menciptakan kesesuaian dengan orientasi ilmu hukum pajak yaitu untuk menjalankan fungsi utamanya yaitu fungsi budgeter dan reguler. Dalam konteks ini, ilmu hukum pajak mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum administrasi perpajakan dan ilmu hukum pajak itu sendiri. Aspek hukum administrasi perpajakan merupakan seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak dan fiskus beserta hubungan timbal balik keduanya terkait pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak (realisasi fungsi budgeter). Adapun aspek hukum pajak merupakan seperangkat hukum pajak materiel dan hukum pajak formil yang mengatur dan memberikan hak-hak hukum bagi wajib pajak maupun fiskus sehingga tercipta

perlindungan hukum dan keadilan di bidang perpajakan (fungsi reguler). Buku
Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup

[Copyright: b62db6eb764a7f65257305a868d85f39](https://www.prenadamedia.com/copyright/b62db6eb764a7f65257305a868d85f39)